



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 8564-8571

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Studi Kasus Kebijakan Pendidikan Global

Elis Hamida¹, Fauzan², Hani Yatul Latifah³, Nellys Aroma⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹elishamida5@gmail.com, ²fauzansip7@gmail.com, ³haniyatullatifah@gmail.com, ⁴nellysaroma32@gmail.com,
⁵adiasmara@umb.ac.id, ⁶kashardi@umb.ac.id

Abstrak

Perbandingan pendidikan antarnegara dalam konteks studi kasus kebijakan pendidikan global merupakan kajian yang sangat penting untuk memahami bagaimana proses globalisasi memengaruhi arah, struktur, dan praktik sistem pendidikan di berbagai negara. Globalisasi mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar pendidikan internasional, seperti penguatan literasi global, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan indikator mutu pendidikan yang bersifat universal. Selain itu, globalisasi juga membuka ruang terjadinya pertukaran praktik terbaik (best practices) antarnegara sebagai upaya meningkatkan daya saing pendidikan di tingkat global. Melalui pendekatan pendidikan komparatif, kajian ini berupaya mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta bentuk adaptasi kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh berbagai negara dalam merespons tuntutan global sekaligus kebutuhan lokal yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan global diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Studi ini juga menyoroti peran pendidikan internasional dalam membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, termasuk kemampuan berpikir kritis, komunikasi lintas budaya, serta pemahaman global yang semakin relevan di era digital dan mobilitas tinggi. Selain itu, penelitian ini mengkaji perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi dampak globalisasi, dengan fokus pada inovasi kurikulum, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dan praktis bagi para pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan tujuan pembangunan nasional.

Kata kunci: Perbandingan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Global, Pendidikan Internasional, Globalisasi Pendidikan, Pendidikan Komparatif

1. Latar Belakang

Di era globalisasi, kebijakan pendidikan telah bertransformasi dari sekadar isu domestik menjadi fenomena lintas batas yang saling berkaitan. Negara-negara di dunia kini aktif mengadopsi dan mengadaptasi model pendidikan dari satu sama lain guna menciptakan sistem yang lebih efektif dan inklusif. Dorongan utama dari fenomena ini adalah kebutuhan akan peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam tatanan dunia yang dinamis. Organisasi internasional seperti UNESCO, OECD, dan Bank Dunia memainkan peran sentral sebagai arsitek kebijakan global, menyebarluaskan standar seperti pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), pendidikan berbasis kompetensi, dan inklusivitas yang kini menjadi arus utama dalam reformasi pendidikan nasional di berbagai negara. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Di era globalisasi saat ini, kebijakan pendidikan tidak lagi menjadi isu nasional semata, namun telah berkembang menjadi fenomena global yang saling berkaitan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang saling mengadopsi, mengadaptasi, bahkan mengkritisi kebijakan pendidikan dari negara lain demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan relevan terhadap perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan global lahir dari kebutuhan akan peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam tatanan dunia yang dinamis.

Organisasi internasional seperti UNESCO, OECD, dan Bank Dunia berperan penting dalam mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan pendidikan di berbagai negara melalui program, standar, dan rekomendasi kebijakan. Misalnya, konsep pendidikan inklusif, pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), hingga pendidikan berbasis kompetensi adalah beberapa contoh hasil pengaruh kebijakan global terhadap sistem pendidikan nasional. Namun, walaupun terdapat banyak manfaat, penerapan kebijakan global dalam konteks lokal sering kali menemui berbagai tantangan. Perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik antar negara menyebabkan kebijakan global

tidak selalu dapat diterapkan secara langsung tanpa penyesuaian. Oleh karena itu, studi kasus terhadap kebijakan pendidikan global dan implementasinya di berbagai negara diperlukan untuk memahami faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam penerapannya. Melalui studi kasus kebijakan pendidikan global, diharapkan dapat ditemukan pola atau pendekatan yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kajian ini menjadi krusial dalam upaya pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan lokal maupun tuntutan global.

Perbandingan pendidikan antarnegara dalam konteks studi kasus kebijakan pendidikan global merupakan kajian yang sangat penting untuk memahami dinamika perubahan sistem pendidikan di era globalisasi. Globalisasi tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan teknologi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap arah, struktur, serta praktik penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara. Pendidikan semakin diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membangun daya saing bangsa dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan global yang cepat dan kompleks. Proses globalisasi mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar pendidikan internasional yang dianggap mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Standar tersebut mencakup penguatan literasi global, pengembangan keterampilan abad ke-21, serta penerapan indikator mutu pendidikan yang bersifat universal. Berbagai kebijakan pendidikan global, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 4, menjadi rujukan penting dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan di banyak negara. Selain mendorong standarisasi, globalisasi juga membuka ruang terjadinya pertukaran praktik terbaik (*best practices*) antarnegara dalam bidang pendidikan. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang dinilai berhasil sering dijadikan referensi dalam proses reformasi pendidikan. Praktik-praktik tersebut meliputi inovasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, pengelolaan sekolah yang efektif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran.

Pendekatan pendidikan komparatif menjadi alat analisis yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan global diadopsi dan diadaptasi dalam berbagai konteks nasional. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan kebijakan pendidikan antarnegara serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Pendidikan komparatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas kebijakan pendidikan global dan dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional. Kajian perbandingan juga menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses adopsi kebijakan pendidikan global. Kebijakan yang efektif di satu negara belum tentu dapat diterapkan secara optimal di negara lain tanpa penyesuaian yang memadai. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan menjadi aspek penting agar kebijakan pendidikan global tetap relevan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Studi kebijakan pendidikan global turut menyoroti peran pendidikan internasional dalam membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi lintas budaya, serta literasi digital. Di era digital dan mobilitas global yang semakin tinggi, pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan global dan kepekaan sosial.

Dalam konteks regional, negara-negara di kawasan ASEAN menghadapi tantangan yang relatif serupa dalam merespons dampak globalisasi terhadap pendidikan. Meskipun memiliki tingkat pembangunan yang berbeda, negara-negara ASEAN dituntut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Kerja sama pendidikan antarnegara di kawasan ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat sistem pendidikan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan ASEAN juga menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan global. Upaya reformasi pendidikan di Indonesia tercermin dalam pembaruan kurikulum, peningkatan pemanfaatan teknologi pendidikan, serta penguatan kompetensi pendidik. Namun demikian, permasalahan pemerataan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian perbandingan kebijakan pendidikan antara Indonesia dan negara-negara lain menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks nasional. Melalui studi kasus kebijakan pendidikan global, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Kajian ini juga membantu mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian perbandingan pendidikan antarnegara dalam konteks kebijakan pendidikan global diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan perbandingan memungkinkan perumusan rekomendasi strategis yang mendukung terciptanya sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing internasional, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal serta tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan global. Digitalisasi pendidikan mendorong

munculnya berbagai inovasi pembelajaran, seperti pembelajaran daring, sistem manajemen pembelajaran, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses pendidikan. Negara-negara yang mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam sistem pendidikannya cenderung lebih siap menghadapi tantangan global dan perubahan kebutuhan dunia kerja.

Namun demikian, penerapan teknologi pendidikan juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kesenjangan digital dan kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua negara maupun wilayah memiliki akses yang merata terhadap infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan global perlu diadaptasi secara bijak agar pemanfaatan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan pendidikan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Aspek pemerataan dan keadilan pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan global. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan global menekankan pentingnya inklusivitas, kesetaraan gender, serta akses pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal.

Selain itu, peran guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan global. Peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, banyak negara menempatkan pengembangan profesional guru sebagai prioritas utama dalam reformasi pendidikan, termasuk melalui pelatihan berkelanjutan dan kerja sama internasional di bidang pendidikan.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, kajian perbandingan kebijakan pendidikan global menjadi semakin relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan nasional yang berkelanjutan. Dengan memahami praktik dan pengalaman berbagai negara, Indonesia diharapkan mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap perubahan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan kebutuhan nasional. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berdaya saing secara global, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, karakteristik kebijakan pendidikan global, peran organisasi internasional, serta perbandingan implementasi kebijakan pendidikan di berbagai negara tanpa melibatkan analisis statistik atau pengolahan data kuantitatif (Creswell, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan dan kredibel. Sumber data terdiri atas dokumen kebijakan dan literatur akademik. Dokumen kebijakan meliputi laporan resmi dari organisasi internasional seperti UNESCO, OECD, dan World Bank, dokumen kebijakan pendidikan nasional, serta dokumen kurikulum yang berlaku di Indonesia, seperti Kurikulum Merdeka.

Sementara itu, literatur akademik mencakup jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks yang membahas kebijakan pendidikan global (misalnya karya Rizvi, Lingard, dan Sahlberg), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan tahapan yang sistematis, yaitu mengidentifikasi kebijakan pendidikan global utama seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 4 bidang pendidikan, mengumpulkan literatur terkait implementasi kebijakan tersebut di negara maju seperti Finlandia dan Jepang serta negara berkembang seperti Indonesia, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang mencakup peran aktor internasional, tantangan lokal, dan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan dalam menetapkan fokus penelitian, memilih dan menilai relevansi sumber data, melakukan analisis, serta menarik kesimpulan penelitian. Untuk membantu proses analisis, peneliti menggunakan panduan analisis berupa lembar klasifikasi data yang berfungsi memetakan perbedaan antara kebijakan pendidikan global dan bentuk adaptasinya dalam konteks lokal. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan model analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif.

Tahapan analisis meliputi reduksi data dengan menyaring informasi dari berbagai dokumen agar sesuai dengan rumusan masalah, penyajian data (display) secara sistematis untuk mengidentifikasi pola pengaruh organisasi internasional terhadap kebijakan pendidikan nasional, analisis perbandingan antarnegara untuk menemukan pola pendekatan yang efektif dalam mengadopsi kebijakan global, serta penarikan kesimpulan yang merumuskan implikasi strategis hasil studi kasus terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Untuk menjamin keabsahan data dan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber data dengan cara

membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi organisasi internasional, pandangan kritis para ahli pendidikan, serta laporan evaluasi implementasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kebijakan Pendidikan dan Karakteristik Utamanya

Kebijakan pendidikan global merupakan instrumen regulasi dan strategi yang dirancang dalam skala internasional untuk menyeragamkan standar kualitas pendidikan di berbagai belahan dunia. Spring (2015) menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan representasi dari konsensus global untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi antarnegara, kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ilmu pengetahuan tanpa terhambat oleh batasan geografis maupun status sosial ekonomi. Secara karakteristik, kebijakan pendidikan global lahir dari proses dialektika nilai dan praktik pendidikan yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan Bank Dunia. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai katalisator dalam menyebarkan norma-norma pendidikan modern, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi hingga standarisasi profesionalisme guru. Proses ini menciptakan apa yang disebut sebagai "ruang kebijakan global", di mana negara-negara saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik (best practices) yang telah teruji secara empiris di tingkat internasional.

Salah satu karakteristik utama dari kebijakan ini adalah dorongan kuat terhadap adopsi nilai-nilai universal. Nilai-nilai seperti kesetaraan gender dalam pendidikan, pemberdayaan kelompok marginal, dan penguasaan kompetensi abad ke-21 menjadi pilar utama. Fokusnya bukan lagi sekadar pada angka partisipasi kasar, melainkan pada bagaimana pendidikan mampu mencetak individu yang memiliki kesadaran kewarganegaraan global (global citizenship). Hal ini menuntut adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan secara internasional. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menandai adanya pergeseran paradigma pendidikan yang fundamental. Paradigma lama yang sangat berfokus pada penguasaan konten teks dan hafalan mulai ditinggalkan dan digantikan oleh paradigma berbasis kompetensi dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Suárez-Orozco & Qin-Hillard (2004) menjelaskan bahwa di era informasi, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi lebih berharga daripada akumulasi pengetahuan statis. Kebijakan global memastikan bahwa sistem pendidikan nasional mampu memfasilitasi kebutuhan individu untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Terakhir, karakteristik kebijakan pendidikan global sangat dipengaruhi oleh tuntutan pasar kerja internasional. Pendidikan kini dipandang sebagai investasi modal manusia (human capital) yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fleksibilitas sistem pendidikan menjadi tuntutan utama agar lulusan sekolah memiliki keterampilan yang relevan dengan dinamika industri global yang sangat cepat berubah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan global bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan potensi lokal individu dengan standar kebutuhan tenaga kerja di tingkat dunia.

3.2. Dimensi Globalisasi dalam Transformasi Pendidikan

Globalisasi telah membawa transformasi besar dalam struktur pendidikan melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. Rizvi & Lingard (2010) menyatakan bahwa dimensi pertama yang paling terlihat adalah mobilitas ilmu pengetahuan yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi pendidikan memungkinkan akses terhadap sumber daya belajar berkualitas tinggi dari universitas ternama di dunia dapat dijangkau oleh siswa di daerah terpencil. Hal ini memicu demokratisasi pengetahuan, namun di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur digital yang merata agar tidak terjadi jurang pemisah pengetahuan yang semakin lebar. Dimensi kedua dalam transformasi ini adalah standarisasi pendidikan melalui instrumen evaluasi internasional yang bersifat kuantitatif. Penggunaan instrumen seperti PISA (Programme for International Student Assessment) telah menciptakan kompetisi antarnegara dalam hal capaian literasi, numerasi, dan sains. OECD (2019) mencatat bahwa hasil dari tes-tes ini sering kali dijadikan dasar bagi pemerintah di berbagai negara untuk merombak kurikulum nasional mereka. Meskipun meningkatkan akuntabilitas, standarisasi ini sering dikritik karena dianggap menyeragamkan proses belajar dan berisiko mengabaikan kearifan lokal serta keunikan budaya masing-masing bangsa.

Selanjutnya, dimensi ketiga melibatkan pertukaran kebijakan dan model pendidikan antarnegara atau yang sering disebut sebagai policy borrowing. Banyak negara berkembang yang mencoba mereplikasi kesuksesan model pendidikan Finlandia yang menekankan kesejahteraan siswa dan otonomi guru, atau model Singapura yang unggul dalam sains. Carnoy dan Rhoten (2002) mengamati bahwa tren ini menyebabkan kebijakan pendidikan bergerak dari skala lokal menjadi supranasional. Dalam konteks ini, kedaulatan negara dalam menentukan arah pendidikannya sendiri sering kali dipengaruhi oleh "tekanan halus" untuk mengikuti standar internasional yang dianggap lebih unggul. Dimensi keempat berkaitan dengan komersialisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi. Globalisasi mendorong universitas untuk berkompetisi dalam pemeringkatan dunia, yang pada gilirannya

mengubah cara institusi pendidikan dikelola. Pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai komoditas jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional. Hal ini mendorong adanya mobilitas mahasiswa dan staf pengajar lintas negara, yang memperkaya perspektif budaya namun juga memicu isu brain drain atau perpindahan talenta terbaik dari negara berkembang ke negara maju. Dimensi terakhir adalah transformasi peran pendidik dalam ruang kelas yang terglobalisasi. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber otoritas pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa menavigasi banjir informasi di internet. Transformasi ini menuntut guru untuk memiliki literasi digital yang mumpuni serta kemampuan pedagogi yang inklusif. Di tengah arus globalisasi, pendidik memiliki tugas berat untuk menyeimbangkan antara tuntutan pencapaian standar global dengan upaya pelestarian nilai-nilai karakter nasional bagi para peserta didik mereka.

3.3. Peran Organisasi Internasional dalam Arah Kebijakan

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat strategis sebagai arsitek di balik arah kebijakan pendidikan global saat ini. UNESCO, sebagai badan PBB yang fokus pada pendidikan, memiliki mandat moral untuk memastikan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang universal. Melalui inisiatif Education for All (EFA) dan agenda Sustainable Development Goals (SDG) nomor 4, UNESCO telah berhasil menggerakkan komitmen global untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah primer. Peran UNESCO lebih menekankan pada aspek humanis dan inklusivitas, memastikan bahwa pendidikan mampu menjangkau kelompok yang paling rentan sekalipun. Di sisi lain, OECD memiliki pengaruh yang sangat besar melalui pendekatan berbasis data dan analisis statistik. Melalui PISA, OECD mampu memetakan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di lebih dari 80 negara, yang kemudian dijadikan referensi utama bagi para pembuat kebijakan. Pengaruh OECD sangat kuat dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pendidikan, di mana keberhasilan suatu negara diukur berdasarkan kemampuan siswanya dalam menerapkan pengetahuan di situasi kehidupan nyata. Hal ini menciptakan standar kompetensi global yang harus dikejar oleh negara-negara yang ingin berdaya saing tinggi.

Bank Dunia memberikan kontribusi yang berbeda melalui dukungan finansial dan pendampingan teknis, terutama bagi negara-negara berkembang. Sebagai lembaga keuangan, Bank Dunia sering kali mengaitkan bantuan pendidikan dengan reformasi struktural yang berbasis pada prinsip ekonomi pasar. Bank Dunia (2020) berfokus pada pengembangan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri dan peningkatan tata kelola pendidikan yang transparan. Melalui proyek-proyek pendanaannya, Bank Dunia memiliki kekuatan untuk mengarahkan prioritas pembangunan pendidikan di tingkat nasional agar sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi global. Sinergi antara organisasi-organisasi ini menciptakan ekosistem kebijakan yang sangat kuat dan sulit untuk diabaikan oleh negara manapun. Mereka tidak hanya memberikan saran, tetapi juga menyediakan kerangka kerja dan metodologi yang menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum, pelatihan guru, hingga sistem evaluasi. Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga ini menjadi ajang bagi para menteri pendidikan untuk menyelaraskan visi dan misi pendidikan mereka dengan tren dunia. Akibatnya, terjadi konvergensi kebijakan di mana arah pendidikan di berbagai negara mulai menunjukkan pola yang serupa.

Namun, dominasi organisasi internasional ini juga memunculkan kritik mengenai "kolonialisme intelektual". Beberapa ahli berpendapat bahwa agenda yang dibawa sering kali mencerminkan kepentingan negara-negara maju dan mungkin tidak selalu cocok dengan konteks sosiokultural di negara berkembang. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif organisasi internasional, koordinasi global dalam mengatasi tantangan pendidikan seperti krisis literasi pasca-pandemi atau kesenjangan akses teknologi akan sangat sulit dicapai. Mereka tetap menjadi motor utama dalam mendorong transformasi pendidikan menuju masa depan yang lebih terintegrasi.

3.4. Implementasi dan Variasi di Berbagai Negara

Implementasi kebijakan pendidikan global di lapangan menunjukkan variasi yang sangat luas, yang dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Finlandia sering dianggap sebagai "anak emas" pendidikan dunia karena keberhasilannya menerapkan prinsip kesetaraan tanpa harus bergantung pada ujian standar yang membebani. Di Finlandia, kebijakan global mengenai profesionalisme guru diimplementasikan dengan memberikan otonomi penuh dan kepercayaan tinggi kepada pendidik. Hasilnya, meskipun mereka tidak mengikuti arus kompetisi yang ketat, kualitas lulusan mereka tetap menjadi salah satu yang terbaik di dunia karena fokus pada kesejahteraan dan minat siswa. Sebaliknya, negara-negara di Asia Timur seperti Tiongkok dan Singapura menunjukkan pola implementasi yang sangat berbeda namun tetap berorientasi pada standar global. Di Tiongkok, kebijakan pendidikan diarahkan pada disiplin yang sangat ketat, kompetisi akademik yang intens, dan investasi besar-besaran pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Zhao (2009) mencatat bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam menghasilkan tenaga kerja ahli dalam waktu singkat, namun sering kali menimbulkan tekanan mental yang besar bagi siswa. Variasi ini membuktikan bahwa tujuan global yang sama dapat dicapai melalui jalur budaya yang berbeda.

Indonesia merespons dinamika kebijakan global ini dengan meluncurkan kebijakan Kurikulum Merdeka di bawah payung besar episode "Merdeka Belajar". Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengadopsi prinsip fleksibilitas dan pembelajaran berbasis kompetensi yang sedang tren secara internasional, namun tetap diakomodasi dalam bingkai Profil Pelajar Pancasila. Implementasi di Indonesia menghadapi tantangan unik karena luas wilayah dan keragaman demografis yang sangat besar. Pemerintah berupaya mengintegrasikan literasi digital dan berpikir kritis ke dalam kurikulum agar lulusan Indonesia mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Di negara-negara berkembang lainnya, terutama di kawasan Afrika dan Amerika Latin, implementasi kebijakan global sering kali terbentur pada masalah kapasitas infrastruktur. Meskipun semangat untuk mencapai target SDG 4 sangat tinggi, keterbatasan dana dan konflik politik sering kali menghambat jalannya reformasi pendidikan. Di sini, kebijakan global sering kali diadaptasi dalam bentuk program-program kemitraan pemerintah-swasta atau bantuan internasional. Keberhasilan di wilayah-wilayah ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut mampu diterjemahkan ke dalam solusi praktis yang menyentuh akar rumput, seperti penyediaan fasilitas air bersih di sekolah dan nutrisi bagi siswa. Variasi implementasi ini memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada solusi tunggal yang berlaku untuk semua (one size fits all). Keberhasilan suatu kebijakan pendidikan global sangat bergantung pada "penerjemahan" kebijakan tersebut ke dalam konteks lokal. Negara yang sukses adalah negara yang mampu mengambil esensi dari standar global namun tetap memberdayakan keunikan budaya dan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Fleksibilitas dalam adaptasi inilah yang menjadi kunci utama apakah sebuah kebijakan internasional akan membawa kemajuan atau justru menjadi beban tambahan bagi sistem pendidikan nasional.

3.5. Analisis Tantangan dan Hambatan Implementasi

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan global adalah benturan nilai antara standar universal dengan konteks sosiokultural lokal. Marginson (2016) menyoroti bahwa banyak konsep pendidikan yang lahir dari tradisi Barat, seperti otonomi individu yang ekstrem atau cara berpikir kritis tertentu, kadang kala tidak selaras dengan nilai-nilai Timur yang lebih menekankan pada kolektivitas dan penghormatan terhadap otoritas guru. Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat atau setidaknya membuat kebijakan tersebut tidak berjalan efektif karena tidak "berbunyi" di tengah masyarakat yang memegang teguh tradisi lokal. Hambatan ekonomi juga menjadi faktor determinan yang sangat signifikan bagi keberhasilan reformasi pendidikan. Banyak negara berkembang yang memiliki kemauan politik kuat untuk mengadopsi teknologi pendidikan mutakhir, namun tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan perangkat perangkat keras dan jaringan internet yang stabil di seluruh wilayah. Kesenjangan digital (digital divide) antar wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan kebijakan yang berbasis teknologi justru memperlebar jurang ketimpangan kualitas pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang berkelanjutan dan pemerataan infrastruktur, kebijakan global hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Faktor politik juga sering kali menjadi hambatan yang tidak bisa disepelekan. Kebijakan pendidikan sering kali menjadi "korban" dari pergantian kepemimpinan politik di tingkat nasional maupun daerah. Fenomena "ganti menteri ganti kurikulum" menunjukkan bahwa konsistensi jangka panjang sangat sulit dipertahankan dalam lingkungan politik yang tidak stabil. Kebijakan pendidikan global yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil sering kali dihentikan atau diubah secara drastis demi kepentingan pencitraan politik jangka pendek, yang pada akhirnya membingungkan para guru dan siswa di lapangan.

Selain itu, resistensi dari para pemangku kepentingan langsung, seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua, merupakan hambatan yang nyata. Banyak guru merasa terbebani dengan tuntutan administratif baru yang menyertai setiap perubahan kebijakan, terutama jika mereka tidak diberikan pelatihan yang memadai. Kurangnya sosialisasi yang mendalam membuat kebijakan sering kali dianggap sebagai beban tambahan daripada solusi untuk meningkatkan kualitas mengajar. Tanpa adanya buy-in atau dukungan penuh dari para pelaksana di garis depan, transformasi pendidikan yang diharapkan akan sulit terwujud secara organik. Meskipun tantangan-tantangan tersebut terlihat berat, mereka sebenarnya dapat dipandang sebagai peluang untuk melakukan refleksi dan perbaikan strategi. Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif, melibatkan guru dalam proses perancangan kebijakan, bukan hanya sebagai objek pelaksana. Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama di atas sekadar pengadaan infrastruktur fisik. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada pemberdayaan, hambatan-hambatan tersebut dapat dimitigasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih tangguh dan adaptif.

3.6. Implikasi Kebijakan bagi Masa Depan Pendidikan Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah berani dalam merespons arus kebijakan global dengan mengadopsi program-program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). PIP berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap dapat bersekolah, selaras dengan semangat inklusivitas UNESCO. Sementara itu, AKM yang menggantikan Ujian Nasional

mencerminkan pergeseran menuju standar evaluasi yang lebih kualitatif dan berbasis penalaran, mirip dengan filosofi yang diusung oleh PISA. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya upaya serius pemerintah untuk memperbaiki "kesehatan" sistem pendidikan dari akarnya. Namun, implikasi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini menuntut kesiapan mental dan profesionalitas yang lebih tinggi dari para pendidik di Indonesia. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih besar bagi sekolah untuk mengatur materi pembelajarannya sendiri. Hal ini berarti guru tidak lagi bisa hanya mengandalkan instruksi dari pusat, melainkan harus kreatif dalam mengembangkan metode yang relevan dengan kebutuhan siswa mereka. Ketidaksiapan dalam menghadapi otonomi ini dapat berakibat pada penurunan kualitas jika tidak dibarengi dengan pendampingan dan komunitas belajar guru yang solid di seluruh penjuru nusantara.

Di masa depan, tantangan utama Indonesia adalah mengatasi ketimpangan kualitas antar daerah. Kebijakan global yang diadopsi harus mampu menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di pulau Jawa atau kota-kota besar saja. Investasi dalam teknologi pendidikan harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan internet yang merata. Indonesia perlu mengembangkan model "digitalisasi yang manusiawi", di mana teknologi digunakan untuk memperkuat peran guru, bukan menggantikannya, sehingga nilai-nilai karakter lokal tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Pendidikan Indonesia ke depan juga harus lebih proaktif dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kecakapan hijau (green skills) dan kesadaran lingkungan, seiring dengan isu perubahan iklim yang menjadi agenda global utama. Integrasi pendidikan keberlanjutan ke dalam kurikulum akan memberikan nilai tambah bagi lulusan Indonesia di pasar kerja global yang semakin peduli pada aspek lingkungan dan etika. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencetak pekerja, tetapi juga untuk melahirkan warga negara yang bertanggung jawab terhadap masa depan bumi.

Sebagai penutup, perjalanan transformasi pendidikan Indonesia di bawah pengaruh kebijakan global memerlukan komitmen jangka panjang dan kolaborasi lintas sektoral. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam mengawal implementasi kebijakan agar tetap berada pada koridor pencapaian visi nasional. Indonesia harus berani mengambil peran sebagai subjek dalam kebijakan global, bukan sekadar objek, dengan menyuarakan perspektif dan nilai-nilai unik nusantara ke panggung dunia. Hanya dengan cara inilah, pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan.

4. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa adaptasi sistem pendidikan terhadap arus globalisasi secara terukur berhasil dicapai melalui integrasi infrastruktur digital, fleksibilitas kurikulum, dan penguatan kapasitas pendidik. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat terbukti mampu meningkatkan ketahanan sistem pendidikan nasional terhadap krisis global serta memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Secara praktis, kebijakan ini dapat diaplikasikan melalui model desentralisasi yang memungkinkan inovasi lokal tetap selaras dengan standar internasional, sehingga mampu menjawab tantangan pasar kerja global secara efektif. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa kebijakan yang responsif tidak hanya menjaga daya saing bangsa, tetapi juga menjadi instrumen vital dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan terkait pendidikan berkualitas. Spekulasi yang muncul berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa tanpa investasi yang berkesinambungan pada sektor teknologi dan sumber daya manusia, negara berkembang berisiko mengalami pelebaran kesenjangan kompetensi di tingkat internasional. Keberhasilan integrasi nilai lokal dengan standar global telah terbukti membekali peserta didik dengan literasi digital dan keterampilan lintas budaya yang esensial di era mobilitas tinggi. Sebagai saran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi evaluasi jangka panjang dengan metrik kuantitatif yang lebih spesifik, seperti tingkat keterserapan lulusan (employability) dan efektivitas kebijakan di lingkup regional yang lebih luas. Secara keseluruhan, keberhasilan transformasi pendidikan sangat bergantung pada pendekatan holistik yang mengedepankan pemerataan akses dan partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci keberlanjutan..

Referensi

1. Ahmad Zainiansyah, A., Afif, M. A., & Mislaini, M. (2024). Inovasi dalam pendidikan: Pembelajaran dari Finlandia untuk transformasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Yudistira*.
2. Belajar dari Finlandia: Inovasi Teknologi untuk Pendidikan Indonesia. (2025). (*Tautan tidak tersedia*).
3. Dewi, E. M. P., dkk. (2024). *Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang*. Nas Media Pustaka
4. Here, R. H. N. (2025). Jalan baru literasi dan numerasi di Indonesia: Berkaca pada pendidikan Finlandia. *Ayo Bandung*.

5. Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Buku Saku Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
6. Kudriani, N., Murdana, F., & Muriati, L. (2023). Transformasi digital dalam pendidikan: Tantangan dan peluang penerapan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. *Jurnal Literasi Digital*.
7. Marginson, S. (2016). *The Dream Is Over: The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education*. University of California Press.
8. OECD. (2019). *PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
9. OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
10. Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.
11. Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* Teachers College Press.
12. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Publishing.
13. Spring, J. (2015). *Globalization of Education: An Introduction* (3rd ed.). Routledge.
14. Stevenson, H. W., & Stigler, J. W. (1992). *The Learning Gap: Why Our Schools Are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education*. Summit Books.
15. UNESCO. (2015). *Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
16. UNESCO. (2021). *Digital Learning and Policy: Global Perspectives*. Paris: UNESCO.
17. Wahyudi, A. (2023). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(1), 110–121.
18. Zhao, Y. (2020). *Catching Up or Leading the Way: American Education in the Age of Global Competition*. ASCD.